

**SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA MUSRENBANG RPJMD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017-2022**



Disampaikan Oleh :

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc

1

Pangkalpinang, 29 Agustus 2017





Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA **2014 - 2019**

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RPJMD

Partisipasi
seluruh
pemangku
kepentingan



penajaman,
penyelarasan, &
klarifikasi



Kesepakatan
Rancangan RPJMD
Tahun 2017-2022
(Program Pembangunan
Daerah Tahun 2018-
2022)



landasan PEMDA
melaksanakan
pembangunan daerah

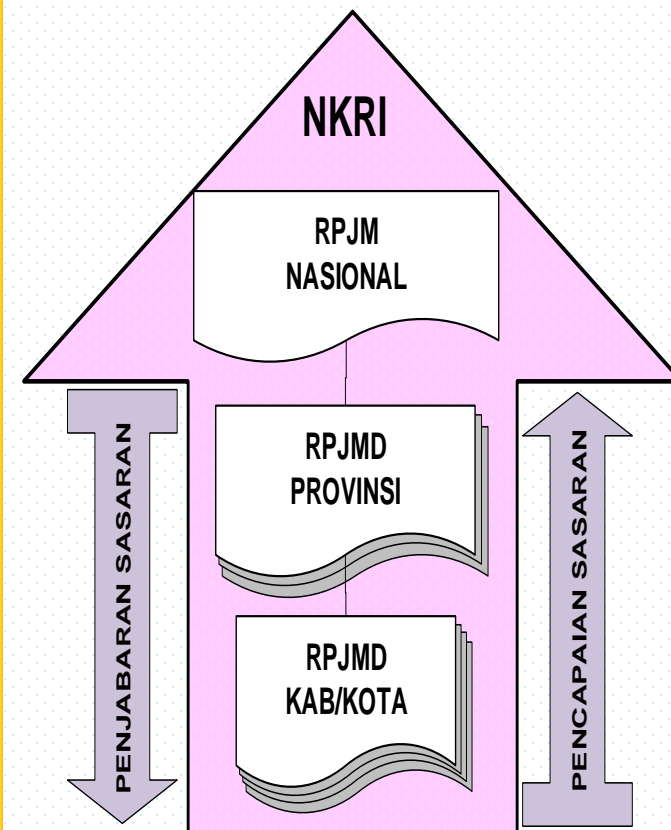


Kesejahteraan
Masyarakat



PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016)

1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan
2. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa:
 - a. Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll.
 - b. Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
3. Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya,
4. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya mengandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja.
5. Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan.
6. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.





KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RPJMD

Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014
ttg Pemda
"RPJMD berpedoman kepada
RPJPD dan RPJMN"

memuat

Visi Misi, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan
pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah
yang disertai dengan
kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif untuk
jangka waktu, 5 (lima) tahun

Substansial

- penjabaran secara konkrit dari visi, misi dan program kepala daerah

Formal

- menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai penjabaran Program dalam RPJMD kedalam kegiatan-kegiatan strategis yang menunjang visi dan misi gubernur

Operasional

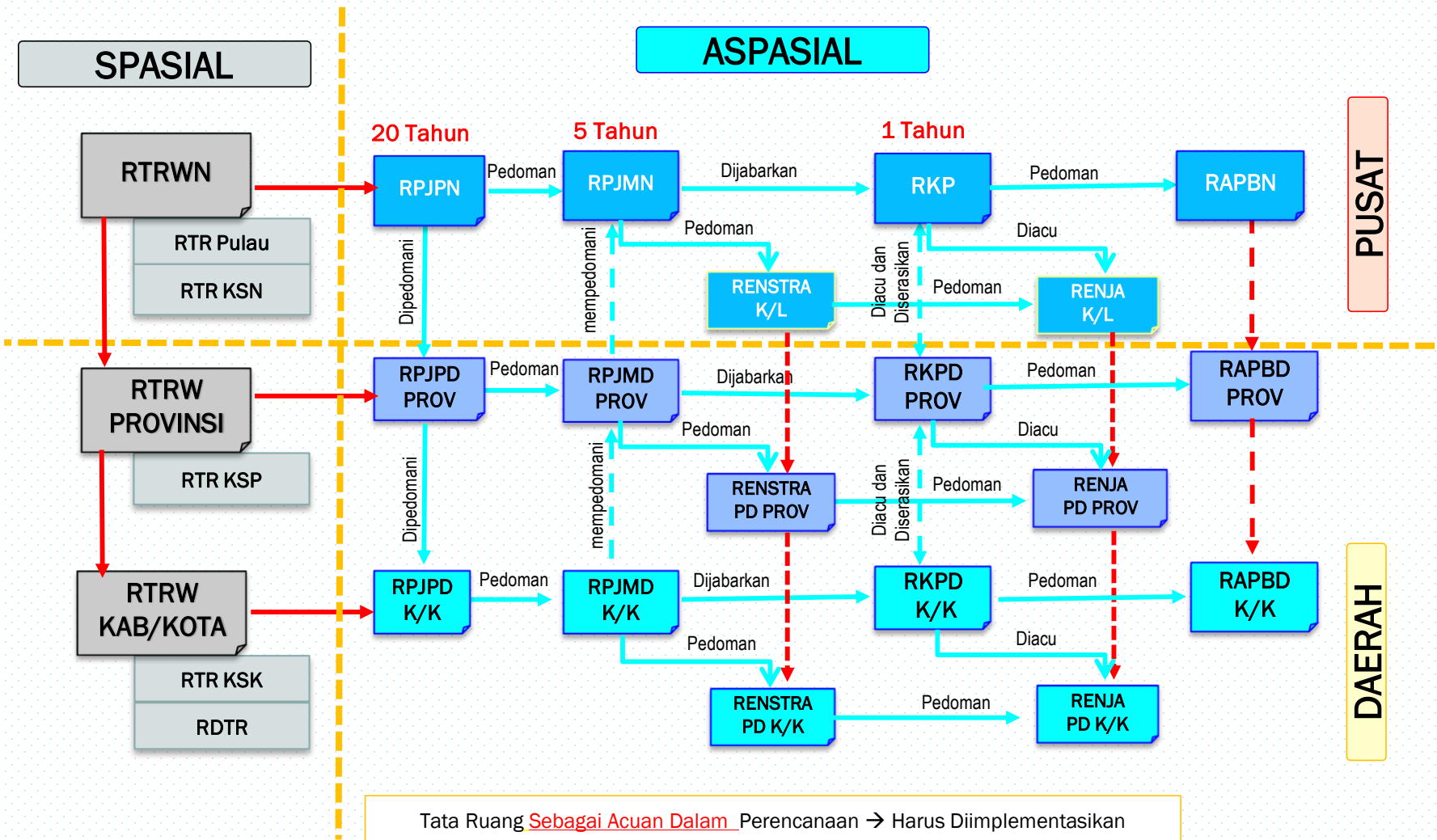
- memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing.

Faktual

menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan

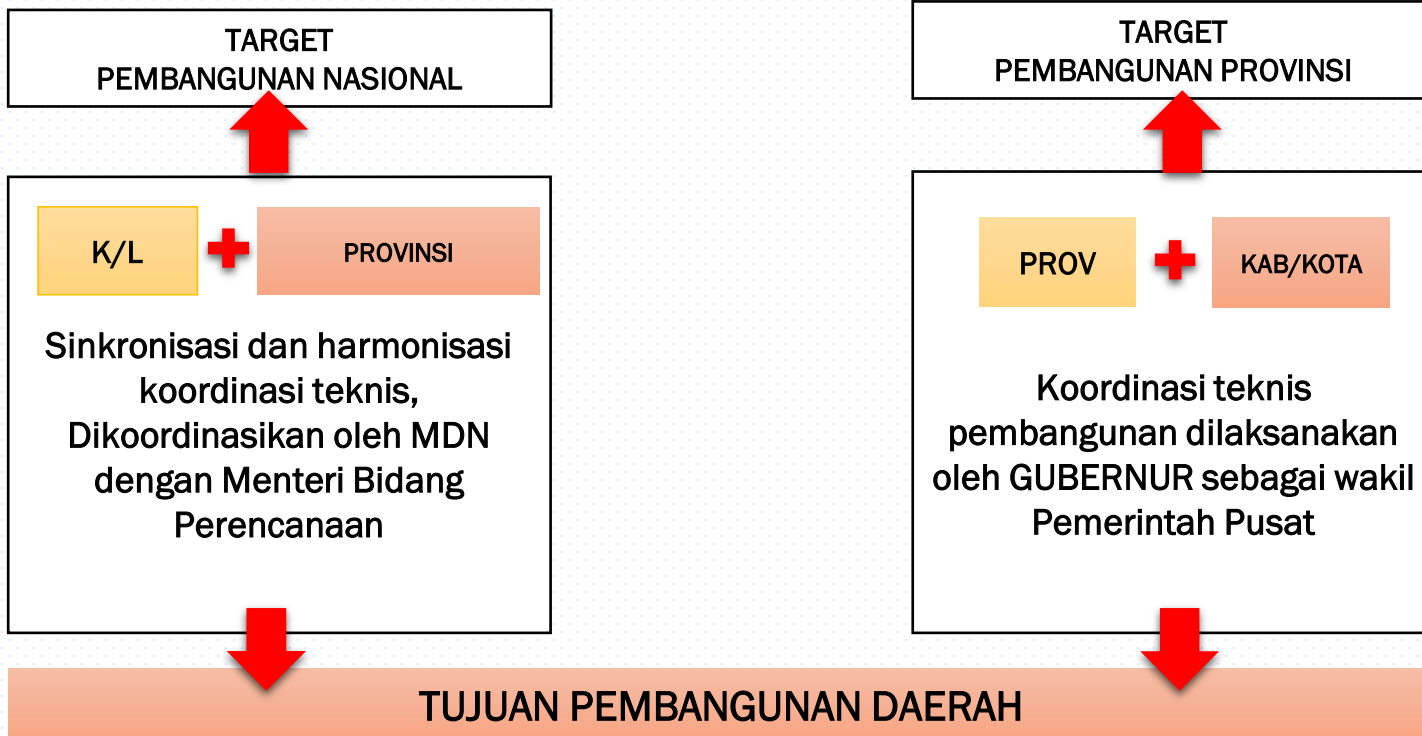


ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH





PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259 UU No. 23 Tahun 2014)



1. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.



**PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**3 Dimensi Pembangunan dan NAWACITA
JOKOWI-JK (RPJMN 2015-2019)**

Pembangunan manusia	Pembangunan sektor unggulan	Pemerataan pembangunan antarwilayah
<p>peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara</p>	<p>upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan • mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah



VISI GUBERNUR KEP BABEL (RPJMD TAHUN 2017 – 2022)
“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”





**PENCAPAIAN "NAWACITA"
MELALUI KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



NAWACITA
VISI & MISI
PRESIDEN

4 Prioritas Pokok

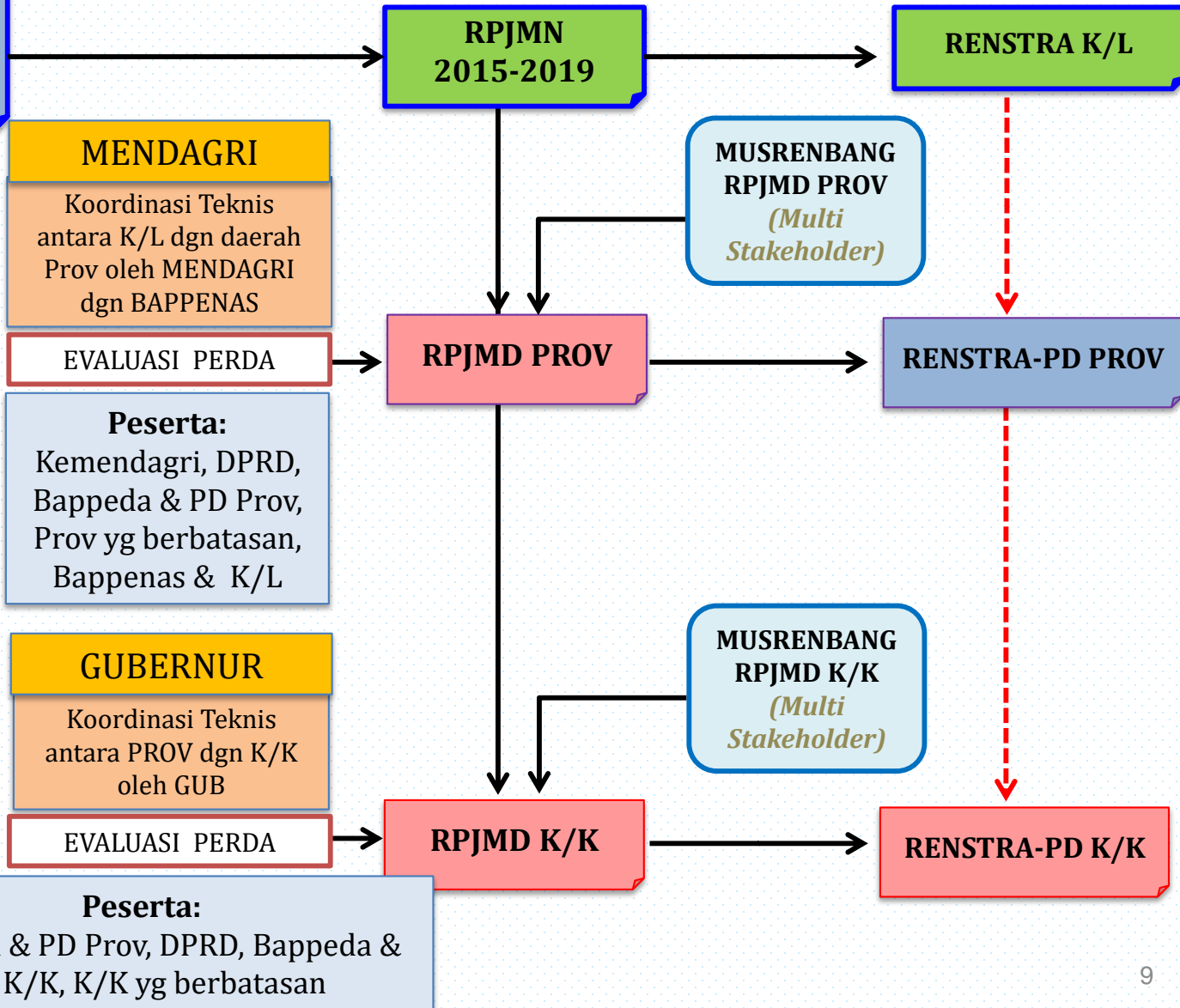
- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi
- Kemaritiman
- Pariwisata & Energi

Prioritas Wajib

- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan

Dimensi Pemerataan

- Antar Wilayah
- Antar Kelompok Pendapatan



Peserta:
Bappeda & PD Prov, DPRD, Bappeda & PD K/K, K/K yg berbatasan

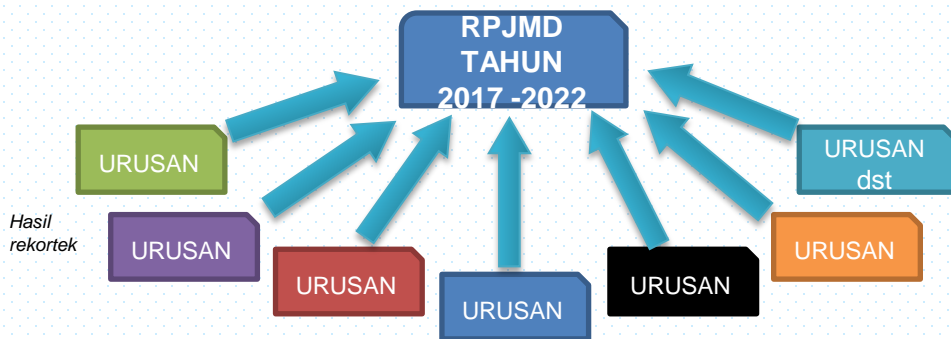


FOKUS KINERJA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH





Penyelarasan Hasil Rakortek 2017 dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



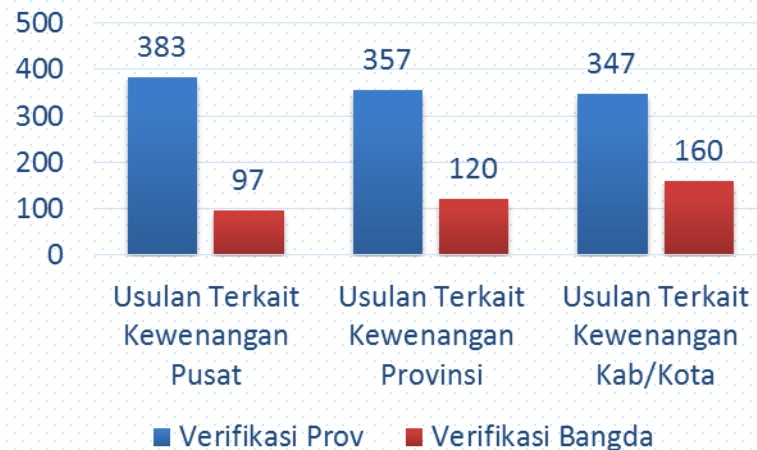
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peningkatan Jalan Kawasan Padang Mulia

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Tenaga Kerja Muda Mandiri)
2. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif)
3. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Teknologi Tepat Guna)
4. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur Pedesaan)

TOTAL USULAN DAERAH DI KEP. BANGKA BELITUNG



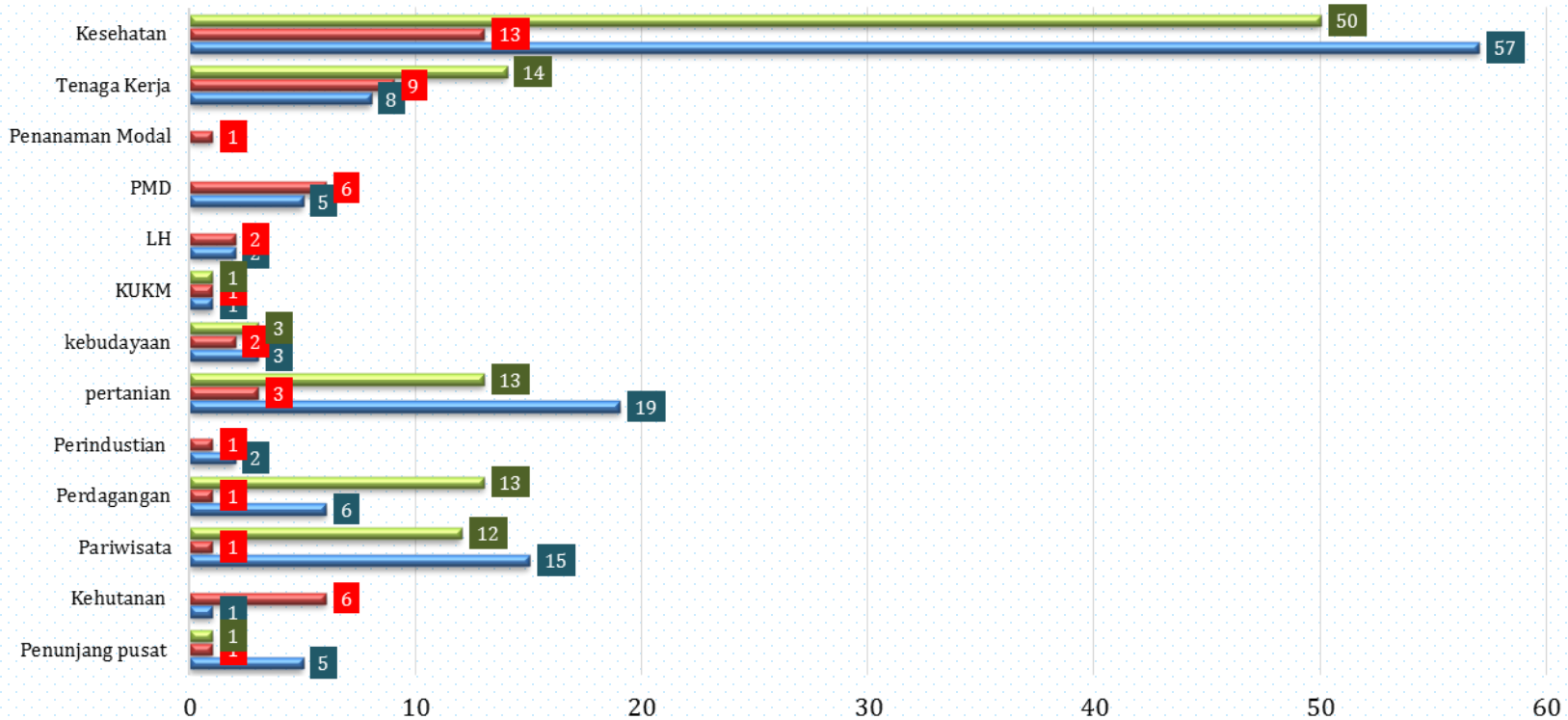


TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

Lanjutan

USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN

■ Kab/Kota ■ Provinsi ■ Pusat



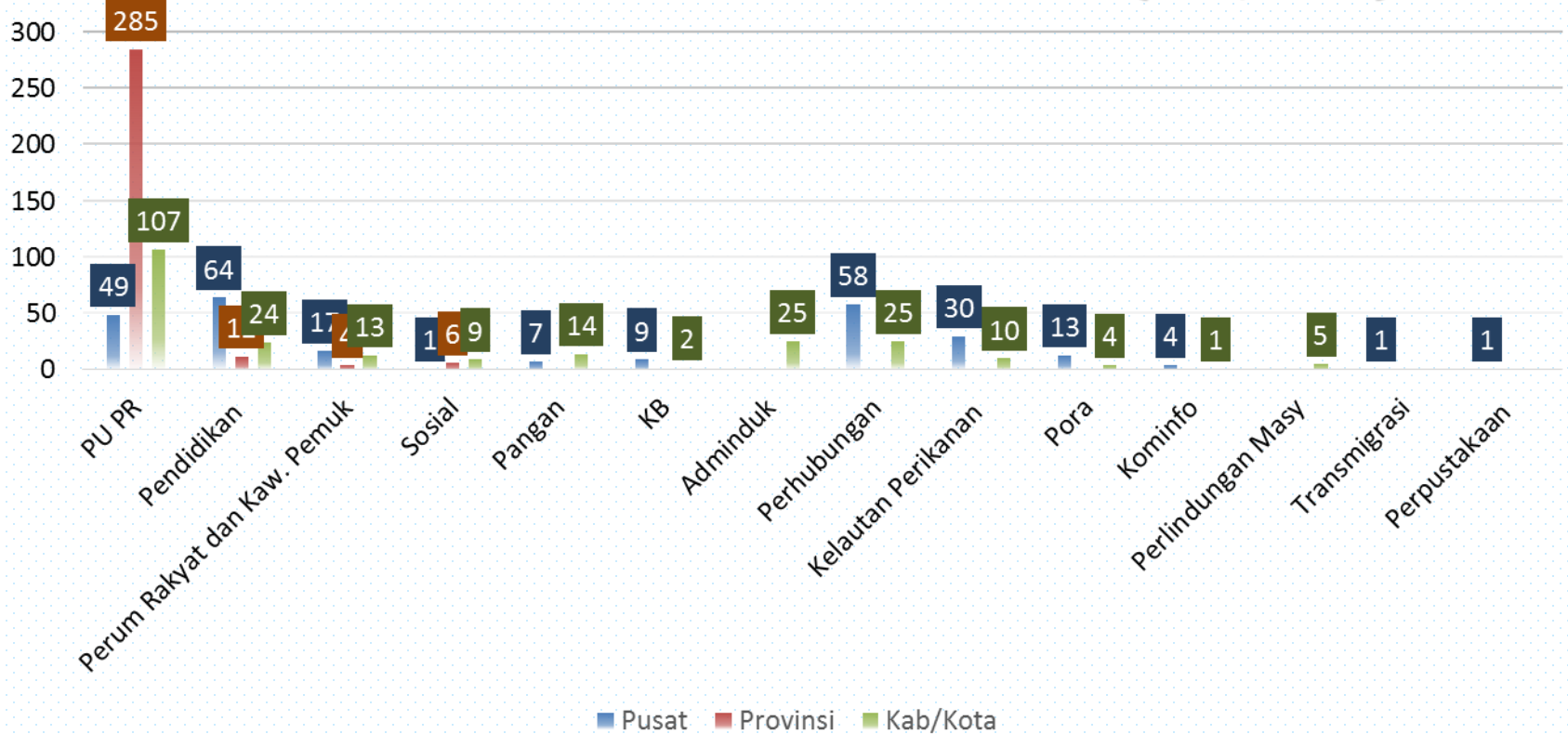


TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

Lanjutan

DATA HASIL VERIFIKASI PROVINSI

USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN (LANJUTAN)





**ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RPJMD
PROVINSI KEPULAUAN BABEL TAHUN 2017 - 2022**





Kondisi Perlu dalam Menjawab Isu Strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

No	Isu Strategis	Kondisi Perlu
1	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah	Optimalisasi Sumber daya unggulan daerah, kemudahan perijinan, deregulasi yang tidak pro pertumbuhan
2	Tingginya tingkat pengangguran	Penciptaan lapangan kerja dan lapangan berusaha sesuai dengan keunggulan daerah
3	Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah	Peningkatan kualitas produk, peningkatan kapasitas pelaku UKM
4	Kemandirian Pangan Rendah	Mendorong peningkatan produktivitas komoditas lokal
5	Tingginya tingkat inflasi	Optimalisasi kinerja TPID dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang relevan
6	Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal	Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mineral



No	Isu Strategis	Kondisi Perlu
7	Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang berkelanjutan
8	Tingkat Investasi Swasta Rendah	Kemudahan berinvestasi
9	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian jumlah penduduk melalui program yang efektif
10	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal	Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik melalui revolusi mental
11	Penguatan ketahanan energi	Mendorong terciptanya energi terbarukan
12	Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan keterbatasan infrastruktur terutama di daerah dan pulau-pulau terpencil	Mendorong percepatana pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas antar wilayah
13	Kualitas SDM masih rendah	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat dan magang



No	Isu Strategis	Kondisi Perlu
14	Pengguna Narkoba dan penderita HIV AID's Meningkat	Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam hal pemberantasan narkoba dan miras
15	Kualitas lingkungan hidup yang rendah dan kerawanan bencana	Tertib tata ruang dan mendorong program yang pro lingkungan hidup

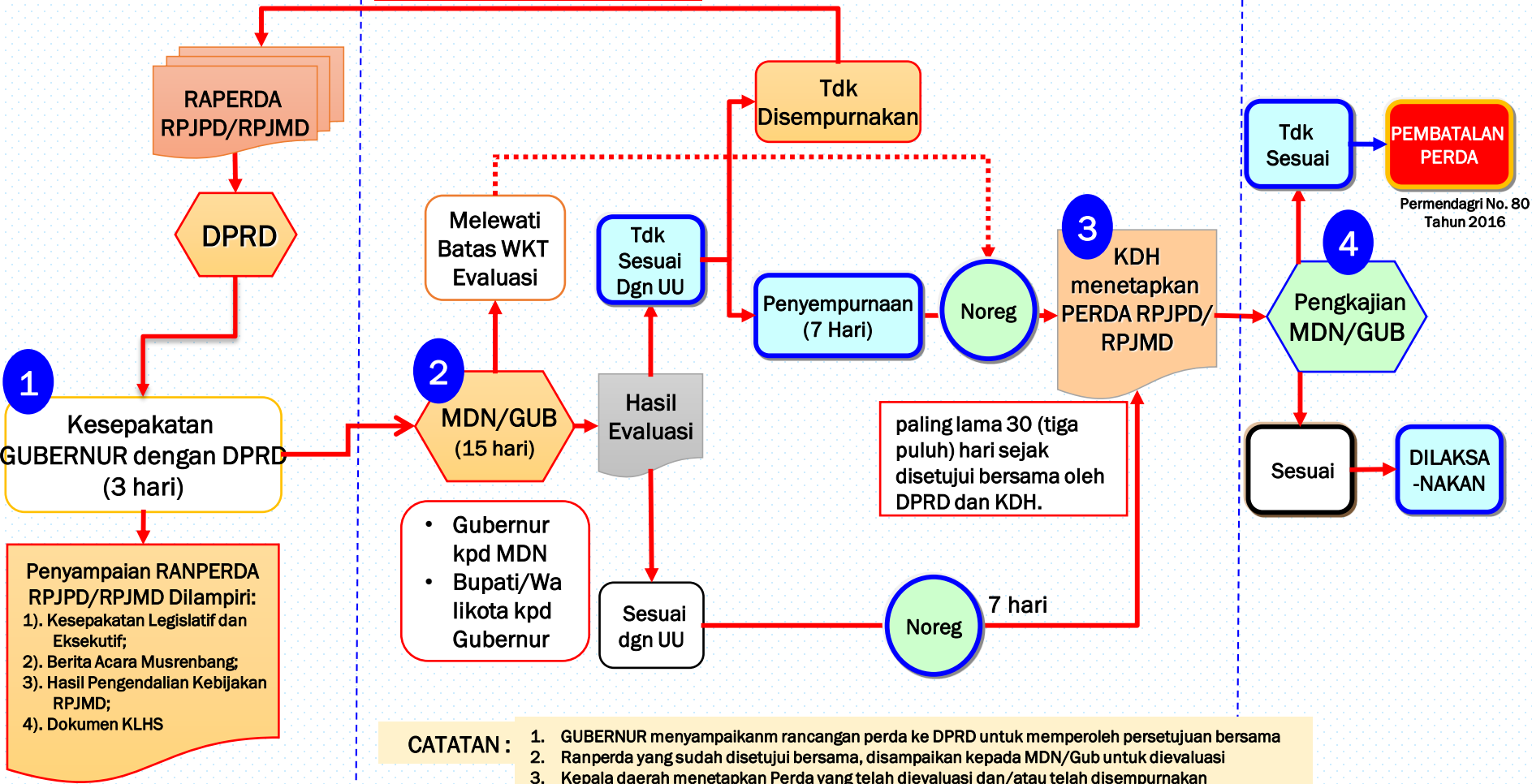


MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD

KEWENANGAN KEMENDAGRI

KEWENANGAN PEMDA

Merumuskan Kembali



CATATAN :

- GUBERNUR menyampaikan rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama
- Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi
- Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan
- MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan.

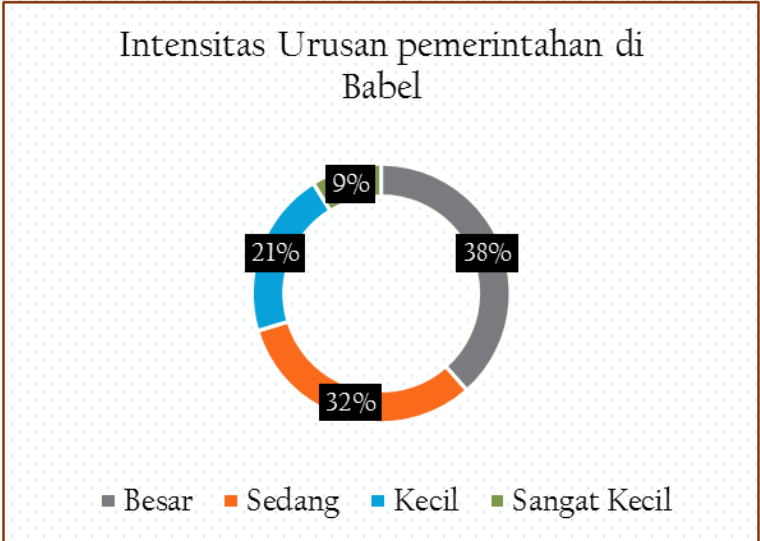


HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

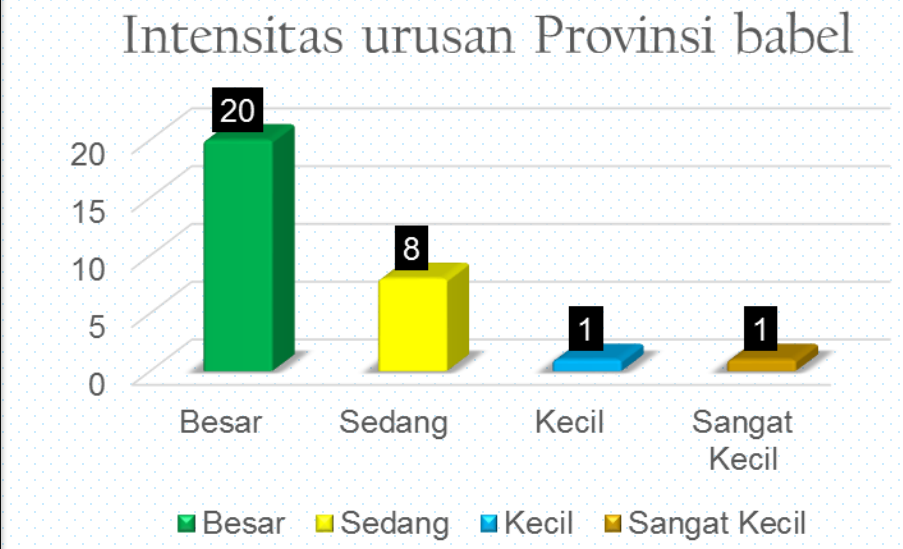
- 1 Agar RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2017 - 2022 dapat ditetapkan sebelum berakhirnya batas waktu penetapan yaitu 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik;
- 2 Agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berupaya menjaga birokrasi yang melayani;
- 3 Merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan yang mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat; dan
- 4 Menyelenggarakan pembangunan yang berbudaya.



HASIL PEMETAAN BANGKA BELITUNG



Besar	Sedang	Kecil	Sangat Kecil
91	75	49	20
27%	32%	24%	10%





PEMETAAN KAB/KOTA DI BABEL

Kabupaten Bangka

Besar : 11 Urusan
Sedang : 9 Urusan
Kecil : 8 Urusan
Sgt Kecil : 3 Urusan

Bangka Barat

Besar : 20 Urusan
Sedang : 7 Urusan
Kecil : 1 Urusan
Sgt Kecil : 2 Urusan

Bangka Tengah

Besar : 10 Urusan
Sedang : 10 Urusan
Kecil : 6 Urusan
Sgt Kecil : 4 Urusan

Bangka Selatan

Besar : 9 Urusan
Sedang : 9 Urusan
Kecil : 9 Urusan
Sgt Kecil : 2 Urusan

Pangkal Pinang

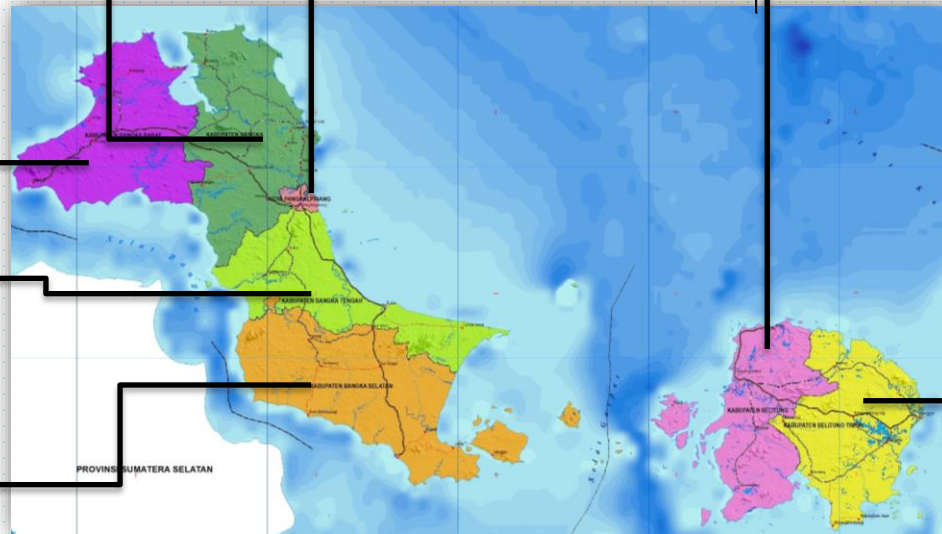
Besar : 4 Urusan
Sedang : 10 Urusan
Kecil : 9 Urusan
Sgt Kecil : 5 Urusan

Kabupaten Belitung

Besar : 10 Urusan
Sedang : 10 Urusan
Kecil : 7 Urusan
Sgt Kecil : 1 Urusan

Belitung Timur

Besar : 7 Urusan
Sedang : 12 Urusan
Kecil : 8 Urusan
Sgt Kecil : 2 Urusan





REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH